



ISLAM KONTEMPORER

DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

ISLAM KONTEMPORER

DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Editor:

Jamhari Makruf

Badrus Sholeh

Yanuardi Syukur

Syahmedi Dean

Daftar Isi

Pengantar Duta Besar Australia	xi
Pengantar Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	xv
Bagian Satu: Islam, Pendidikan Multikultural dan Harmoni Sosial	1
Belajar Menjadi Minoritas: Refleksi Kehidupan Minoritas Muslim di Australia dan Wilayah Timur Indonesia (<i>Subhan Setowara</i>)	3
Islam Multikultural: Pengalaman Menjadi Muslim di Australia (<i>Nikmatullah</i>)	11
Islam Multikultur Islam <i>Rahmatan Lil 'Alamin</i> (<i>Said Wahid</i>)	24
Implementasi Dakwah Kultural di Australia (<i>Sari Narulita</i>)	33
Robohnya Joyah Kami: Kehidupan Lansia di Gayo Aceh Tengah (<i>Rosnida Sari</i>)	48
Pemahaman Lintas Budaya Pelajar di Luar Negeri (<i>Imelda Wahyuni</i>)	53
Gelora Suara dari Dunia Sunyi (<i>Melati Adidamayanti</i>)	60
'Green Islam' di Indonesia dan Prospek 'Eco-Pesantren' (<i>Mohammad Hasan Basri</i>)	69

Falsafah <i>Siri' Na Pacce</i> pada Suku Bugis Makassar dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i> (Rizal Darwis)	76
Konstruksi Islam Kontemporer Indonesia dalam Perspektif Budaya: Studi tentang Sufisme Islam dan Pelembagaan Moral Etika Barat dalam Kehidupan Masyarakat di Indonesia dan Australia (Rubaidi)	86
Pendidikan Multikultural Berbasis Al-Qur'an: Implementasi Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Siraat College (Oki Setiana Dewi)	98
Sistematisasi Pengetahuan Lokal Keislaman di Lombok? <i>Bring it on!</i> Potensi Jembatan Hubungan Kebudayaan Indonesia-Australia (Muchammadun)	108
Membangun Empati, Toleransi, dan Sikap Welas Asih dalam Masyarakat Inklusif Pluralis (Ikfina Maufuriyah)	115
Relasi Islam dan Kebudayaan dalam Perspektif <i>Cross Cultural Fertilization</i> (Aan Rukmana)	123
Filosofi Musikalitas Kiai Kanjeng bagi Kematangan Religiusitas Masyarakat Indonesia (Abdulloh Fuadi)	131
Budaya Akademik Islami di Kampus (Non) Islam (Choiril Anwar)	139
Merayakan Keragaman dan Perbedaan: Pengalaman Mahasiswa Indonesia di Australia (Debbie Affianty)	145

Memahami Islam di Negara Non Islam: Kajian tentang Pertukaran Budaya antar Bangsa (<i>Dwi Setianingsih</i>)	155
Muslim Kosmopolitan di Australia: Sebuah Teladan dalam Keberagaman (<i>Fahmi Syahirul Alim</i>)	162
Model Edukasi Kedamaian Dalam Tembang Dolanan Warisan Walisongo (<i>Muslihati</i>)	169
Developing Interfaith Dialogue <i>at the Basic of Pluralism Values</i> Studi Pengalaman Pesantren Ngalah Pasuruan dalam Menciptakan Keharmonisan Umat Beragama (<i>Muhammad Muntahibun Nafis</i>)	178
Bagian Dua: Demokrasi, Radikalisme Dan Kontra-Terrorisme	189
Islam dan Demokrasi di Indonesia (<i>Roswita M. Aboe</i>)	190
"The Flowering Islam": Islam dan Demokrasi Pengalaman Indonesia (<i>Husni Mubarrak</i>)	201
Islam Indonesia Pasca Aksi 212: Tantangan Bagi Muslim Moderat (<i>M. Khusna Amal</i>)	208
Propaganda Teroris, Media Sosial dan Generasi Millennial Indonesia (<i>Elis Z. Anis</i>)	217
Melawan dengan Cerita (<i>Fahd Pahdepie</i>)	229
Mencegah Radikalisme pada Pemuda Dengan Mengoptimalkan Media Online (<i>Ikhwan Reza</i>)	239

Gerakan Ayo Mondok: Menegaskan Khittah Pesantren sebagai Pengembang Tradisi yang Plural dan Toleran (<i>Hindun Anisah</i>)	245	Pembumian Tafsir Pancasila Hamka Terhadap Masa Depan Islam di Indonesia dan Australia (<i>Akmal R. G. Hasibuan</i>)	317
Islam Transnasional di Kota Jayapura: Beberapa Observasi (<i>Ridwan Al-Makassary</i>)	254	Pengaruh Peran Keagamaan, Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan terhadap Tindakan Menggunakan 'Paytren' Melalui Teknologi Akseptasi Model (<i>Vika Martianingtyas</i>)	326
Gerakan Neo-Salafisme dan Tantangannya terhadap Kehidupan Beragama dan Adat Budaya Masyarakat Jambi (<i>Mohamad Rapiq</i>)	261	Mengenal Lembaga Keuangan Berbasis Syariah di Australia (<i>Yudi Ahmad Faisal</i>)	337
Bagian Tiga: Islam dan Institusi Keagamaan dan Hubungan Indonesia-Australia	269	Organisasi Islam Non-Pemerintah dan Isu Kebencanaan di Indonesia (<i>Muhammad Zahrul Anam</i>)	350
Filantropi Islam: Hubungan Negara dan Agama, serta Penguatan Masyarakat Sipil (<i>Amelia Fauzia</i>)	270	Gereja di Perkampungan Muslim (<i>Siti Tarawiyah</i>)	366
Promosi Islam Moderat di South Australia: Pelajaran Berharga dari Kajian Islam Adelaide (<i>Yuyun Sunesti</i>)	279	<i>Mamacan</i> di Desa Bayan Lombok Utara: Menjaga Tradisi Lokal dan Diseminasi Ajaran Islam (<i>Zakiyah</i>)	374
Indonesia, Agama dan Negara Pengalaman Belajar Kebijakan Negara atas Agama di Australian National University (ANU) Canberra (<i>Ismatu Ropi</i>)	293	Beragama secara Transitif: Konsep dan Implikasi (<i>Khoiruddin Nasution</i>)	386
Pembelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia lewat <i>Video Teleconference</i> Antara Santri PPMI Assalaam Pabelan Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia dengan Murid Portland Secondary College Victoria dan Scotch College Perth Australia (<i>Bambang Arif Rahman</i>)	308	Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Australia (<i>Lis Safitri</i>)	398
		Pesantren and Aktivisme Sosial-Ekonomi yang Mengakar di Masyarakat (<i>M. Falikul Isbah</i>)	408
		Menjadi Madrasah Unggul Melalui Learning Organization (<i>Miftahus Sa'adah</i>)	419

Para Pelopor dan Pegiat 'Islam Pasar' di Indonesia (<i>Najib Kailani</i>)	428
Dinamika Islam Tradisional di Indonesia: Tradisi Kitab Kuning di Pesantren dalam Upaya Intervensi Negara (<i>Iksan Kamil Sahri</i>)	440
Bagian Empat: Jender, Perempuan dan Kaum Muda	457
Pentingnya Mendengar Suara Perempuan (<i>Nina Nurmila</i>)	458
Maskulinitas dan Kekerasan Agama (<i>Noor Huda Ismail</i>)	468
Islam dan Gender: Sosialisasi Kesetaraan Gender melalui Pelatihan Sepak Bola di Pesantren (<i>Farinia Fianto</i>)	484
Potret Perempuan Muda Dewasa Muslim dalam <i>Chick Lit</i> Indonesia dan Australia (<i>Hujuala Rika Ayu</i>)	493
Seorang Muslimah di Melbourne: Proses Pemahaman Lintas Budaya (<i>Kusumarasyati</i>)	500
Kontekstualisasi Aktifisme Muslimah dan Wacana Tubuh Perempuan di Indonesia (<i>Atik Ambarwati</i>)	508
Kaum Muda dan Maskulinitas "Islam" Baru di Media Sosial Instagram (<i>Firly Annisa</i>)	519
Perempuan dalam Jamaah Tabligh: Peran dan Problem Gender (<i>Sukron Ma'mun</i>)	530

Melatih Perempuan Menjadi Ulama: Pengalaman Ma'had Aly di Jawa Indonesia (<i>Nor Ismah</i>)	540
Hak Pengasuhan Anak dalam Konflik Orang Tua: Perbandingan Kasus Sistem Hukum Indonesia dan Australia (<i>Rita Pranawati</i>)	549
Biodata Penulis	558
Biodata Editor	583

Islam Indonesia Pasca Aksi 212: Tantangan Bagi Muslim Moderat

M. Khusna Amal

Pendahuluan

Tren demokrasi Indonesia cenderung merosot dalam beberapa tahun terakhir ini. Setelah mengalami perkembangan pada 1998, 1999, dan 2005, indeks demokrasi Indonesia (IDI), berada pada posisi menengah dan bawah (skala 60-70). Hasil laporan *United National Development Program (UNDP)*, menyebutkan bahwa IDI menempati posisi 63,17 pada 2010, menurun dari 67,30 pada 2009. Pada 2011, terjadi peningkatan sedikit di angka 65,48, namun kembali merosot di angka 63,72 pada 2013. Pada 2015 mencapai angka 72,82, sedikit mengalami penurunan dibandingkan 2014 yang mencapai sebesar 73,04 (BPS, 2016; Haluan, *Indeks Demokrasi Indonesia dan Tantangannya*, 2016).

Freedom House, *Polity IV Index*, *World Bank*, dan sejumlah lembaga lainnya, mendeteksi bahwa penurunan demokrasi dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya adalah kebebasan sipil, termasuk di dalamnya adalah kebebasan berkeyakinan. Sebagai gambaran, kebebasan sipil berada pada posisi 86,97 pada 2009 dan menurun menjadi 82,53 pada 2010. Kebebasan sipil pada 2013 mencapai 79,00 naik dari 77,94 pada periode 2012. Pada periode 2015, kebebasan sipil turun menjadi 80,30 dari sebelumnya 82,62 pada periode 2014. Meski demikian, ada sedikit peningkatan dalam hal institusi demokrasi, yaitu dari 62,72 di 2009, naik menjadi 63,11 di 2010 (Marcus Mietzner, *Democratization*; 209-229; UCAN Indonesia, 2012).

Mengapa aspek kebebasan sipil yang mengalami penurunan? Tulisan ini berpandangan bahwa menurunnya kebebasan sipil, terutama menyangkut variable kebebasan berkeyakinan, berkaitan erat dengan peningkatan intoleransi di Indonesia. Hasil survei Komnas HAM, misalnya,

mencatat ada 74 kasus intoleransi pada 2014, meningkat menjadi 78 kasus pada 2015, dan mencapai hampir 100 kasus pada 2016 (Kompas.com, 05/01/2017). Bagaimanapun, meningkatnya tindakan intoleransi tidak bisa dilepaskan dari menguatnya paham dan gerakan radikalisme agama yang disponsori oleh agen-agen Islam intoleran yang tumbuh dan berkembang pesat dalam ruang kebebasan pasca Orde Baru (Vedi R. Hadiz, 2011, Ariel Heryanto, 2006; Mark R. Woodmard, 2001).

Aksi 212 atau populer dengan sebutan 'aksi bela Islam', merupakan salah satu contoh kasus gerakan intoleransi yang penting untuk dikaji kembali dalam upaya untuk menjelaskan kaitan antara Islam dan kemerosotan demokrasi. Tulisan ini berargumen bahwa munculnya aksi 212 dengan politik identitasnya, telah berdampak serius terhadap merosotnya citra Indonesia sebagai negara Muslim democrat terbesar di dunia. Saat bersamaan, perlawanan yang ditunjukkan oleh agen-agen Islam moderat dan kehadiran negara untuk ikut terlibat dalam membendung arus radikalisme agama, belum sepenuhnya mampu mengembalikan wajah *sumringah* Islam (*smile Islam*) dan demokrasi Indonesia.

Aksi 212: Penetrasi Islam Intoleran

Aksi 212 merupakan salah satu aksi bela Islam yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta. Dari sekian aksi bela Islam itu, aksi 212 tercatat sebagai yang paling populer dan fenomenal. Dilihat dari jumlahnya, massa yang mengikuti aksi 212 mencapai kisaran 500.000 sampai 750.000 orang dan berhasil 'memaksa' pemerintahan Jokowi untuk menemuinya. Aksi 212 ini pula yang digunakan oleh para proponennya sebagai simbol identitas kelompok dan sekaligus spirit gerakan selama dan setelah Pilkada usai. Melalui spirit 212, para proponent aksi berusaha untuk terus mengonsolidasikan kelompoknya dan mentransformasikannya menjadi kekuatan sosial, ekonomi dan bahkan politik. Belakangan, muncul inisiatif dan inovasi dari alumni 212 (dan sebagian sudah dwujudkan) untuk membuat minimarket 212, perekonomian syari'ah 212, dan bahkan partai politik 212.

Dilihat dari aktor dan agendanya, aksi 212 melibatkan umat Islam dari beragam kalangan dan kelas sosial. Menurut Vedi R. Hadiz, aksi 212 lebih merepresentasikan aliansi longgar antara kelompok miskin kota yang tergabung dalam grup *vigilant*, kelas menengah religious, dan beberapa elit pemuka agama, tokoh politik dan bisnis (Ari A. Perdana, 2017). Hanya saja, tokoh sentral yang berperan sebagai operator di lapangan, kebanyakan berasal dari agen-agen Islam intoleran. Fron Pembela Islam (FPI), Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Forum Umat Islam (FUI), *Wahdah Islamiyah*, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) GNPf-MUI, merupakan unsur-unsur Islam intoleran yang menjadi motor utama aksi 212.

Sementara itu, agenda perjuangan aksi 212 banyak dikaitkan dengan tuntutan hukum terhadap Ahok, gubernur DKI Jakarta, yang dinilai telah menistakan agama. Meski demikian, tidak sedikit analisis yang menilai bahwa ada agenda yang jauh lebih besar dari apa yang mereka suarakan itu. Di samping berkepentingan untuk menggagalkan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua kalinya, aksi juga memiliki *hidden agenda* lebih besar berupa pelengseran Jokowi. Di luar motif politik praktis itu, perubahan konstitusi seperti mewajibkan penerapan hukum Islam, larangan terhadap pemimpin non-Muslim dalam komunitas yang mayoritas Islam, pelaksanaan lebih besar ketentuan syari'ah, dan pencalonan para pemimpin politik untuk posisi eksekutif yang lebih bersimpati pada tujuan Islamis, tidak bisa disingkirkan begitu saja dari motif politik aksi 212 (Greg Fealy, 2016).

Di atas semua itu, kehadiran aksi 212 penting dibaca sebagai representasi kekuatan Islam intoleran yang semakin mendapatkan tempat dalam ruang publik Islam di Indonesia. Aksi 212 telah menjadi semacam simbol identitas politik, kekuatan dan bahkan kebangkitan kelompok intoleran dalam oposisinya dengan berbagai kekuatan sosial yang tidak segaris dengan ideologi politiknya, terutama Islam moderat yang selama ini menjadi kompetitor utama dalam menentukan wajah Islam dan

perpolitikan di Indonesia. Faktual, aksi 212 telah berhasil meningkatkan pamor dan pengaruh para agennya yang *nota bene* berasal dari kalangan Islam politik sebagai pusat perhatian publik, dan sekaligus meminggirkan kelompok-kelompok Islam moderat yang selama ini *concern* memperjuangkan agenda toleransi, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi.

Dampaknya terhadap Islam Indonesia

Islam Indonesia tak ubahnya seperti medan pertempuran dan sekaligus perjuangan (*champ*) yang melibatkan berbagai kekuatan sosial. Sejauh ini, kelompok Islam toleran yang tampil sebagai kekuatan utama yang berhasil mendominasi, menentukan citra, dan mengarahkan perkembangan Islam Indonesia. Bagaimanapun, kiprah agen-agen Islam toleran telah memberikan image positif terhadap Islam Indonesia yang dikenal ramah, damai, dan akomodatif terhadap demokrasi. Berbeda dari Islam di berbagai negara Muslim, terutama Timur Tengah, Islam Indonesia dinilai *compatible* dengan demokrasi. Dalam pengakuan sejumlah ahli, Indonesia yang disokong oleh unsur-unsur Islam tolerannya, telah menjelma menjadi negara Muslim demokrat terbesar di dunia (Saiful Mujani, 2017, Robert W. Hefner, 2000).

Namun seiring dengan meningkatnya paham dan gerakan radikalisme agama yang dilancarkan oleh agen-agen Islam intoleran, tidak sedikit publik yang mulai pesimis, meragukan dan bahkan mempertanyakan kemoderasian Islam Indonesia. Tidak sebatas non-Muslim, sebagian Muslim Indonesia pun mulai gamang dan meragukannya. Masih tepatkah Islam Indonesia disebut moderat setelah apa yang terjadi (aksi 212) belakangan ini, merupakan pertanyaan yang mulai bermunculan ke publik. Hampir semua ahli berpandangan jika aksi 212, telah membawa dampak buruk bagi citra Islam Indonesia. Politik rasisme yang dilancarkan para proponent 212, terutama dalam hal penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*), telah menjadikan wajah Islam Indonesia tampak konservatif dan intoleran. Bagaimanapun, aksi 212 turut memberikan asupan bergizi bagi makhluk

intoleransi untuk tumbuh dan berkembang secara produktif (Martin van Bruinessen, 2013; Jeremy Menchik (2014).

Seiring dengan pertumbuhan kelompok-kelompok intoleran, maka berbagai bentuk tindakan radikalisme pun mengalami peningkatan pesat. Setidaknya hal ini ditunjukkan oleh sejumlah hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga kajian dan survei. Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), misalnya, menjelaskan bahwa pada periode oktober 2010 sampai Januari 2011, terdapat hampir 50 persen pelajar setuju tindakan kekerasan berdasarkan radikalisme. Data ini juga menyebutkan bahwa 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Yang lebih mencengangkan, ada 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju penerapan syari'at Islam di Indonesia. Jumlah yang setuju kekerasan demi solidaritas agama mencapai 52,3 persen siswa. Di antaranya, ada 14,2 persen yang membenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk serangan bom (tirto.id, 16 Maret 2016).

Kehadiran Negara dan Respon Balik Muslim Moderat

Dihadapkan pada serangkaian aksi 212 yang dilancarkan oleh agen-agen Islam intoleran, negara tidak tinggal diam. Meski harus diakui bahwaantisipasi dan responnya tidaklah cukup cepat dan efektif. Sulit untuk ditutup-tutupi jika negara terlihat gagap dan gugup melihat tekanan massa yang begitu besar dan berkesinambungan. Pada aksi 411, Jokowi cenderung memilih untuk menghindari massa. Baru pada aksi 212, Jokowi beserta jajaran aparatus pemerintahannya benar-benar hadir di tengah-tengah massa. Meski demikian, tidak banyak terosbosan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menormalisasikan keadaan. Jokowi seolah berjalan sendirian tanpa banyak di-*back up* para mitranya di pemerintahan.

Setelah aksi 212 itulah, Jokowi melakukan terobosan dengan mengonsolidasikan kekuatannya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Di dalam institusi pemerintahan, Jokowi berusaha mensinergikan kembali berbagai unsur koalisi pendukung pemerintah, terutama dalam interaksinya dengan Yusuf Kalla yang disebut kerap

berseberangan. Di luar itu, Jokowi melakukan safari politik dengan menemui para ketua umum partai politik baik mitra maupun oposisinya, terkhusus Prabowo Subianto. Tidak ketinggalan, Jokowi juga menggandeng pimpinan-pimpinan ormas moderat, terutama NU dan Muhammadiyah, untuk ikut bergandengan tangan dalam meredam aksi intoleransi.

Secara perlahan, pemerintah mulai mampu menstabilkan keadaan dan sekaligus mengontrol aksi 212 agar tidak semakin membesar. Pada puncaknya, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perpu) tentang ormas, yang salah satu korbannya adalah HTI. Munculnya perpu inilah yang kemudian memunculkan polemic hebat dan berkepanjangan. Masyarakatpun terbelah menjadi, sekurang-kurangnya, dua kelompok, yaitu antara yang pro-perpu dan kontra-perpu. Bagi kelompok yang pro-perpu, yang kebanyakan berasal dari elemen Muslim moderat, lahirnya perpu itu sebagai bukti kehadiran negara dalam meredam paham dan gerakan radikalisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Meski demikian, tidak semua unsur Muslim moderat sepatutnya dengan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, unsur-unsur Islam radikal sudah pasti menolaknya karena dinilai sebagai bentuk balas dendam pemerintah terhadap kelompok-kelompok Islam yang tergabung dalam aksi 212.

Kritik atas kebijakan pemerintah tersebut juga datang dari sejumlah aktivis HAM, demokrasi, dan juga para pengamat politik. Sebagian dari mereka berpandangan bahwa upaya pemerintah untuk mengontrol kelompok-kelompok Islam radikal tidak perlu melalui Perpu. Sebagian yang lain berpendapat bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Perpu itu merupakan bentuk kebijakan otoritarianisme. Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat demokrasi. Dalam konteks demokrasi, usaha pemerintah untuk dapat membendung paham dan gerakan radikalisme tidak seharusnya dilakukan dengan cara-cara intoleran.

Tidak jauh beda dengan pemerintah, unsur-unsur Muslim moderat pun sebenarnya dibuat *gagap* pula dengan munculnya serangkaian aksi bela Islam. Hanya sebagian kecil dari kalangan moderat yang berani tampil

ke permukaan dan bersuara lantang melakukan *counter* aksi 212. Syafi'i Ma'arif, dari kalangan Muhammadiyah, tercatat sebagai salah satu tokoh moderat yang sejak meletusnya aksi 212, mengambil posisi tegas, *vis a vis* aksi 212. Meski tidak setegas Syafi'i Maarif, dari unsur pimpinan PBNU, Said Aqiel Siradj, mengambil posisi yang sama. Selebihnya, hanya sedikit sekali elit pimpinan, intelektual dan aktivis Muslim moderat yang mengambil sikap progresif dalam merespon aksi 212. Bahkan di kalangan internal Muslim moderat sendiri, terjadi polarisasi dan perpecahan dikarenakan sebagian dari komunitas ini ada yang mendukung dan terlibat dalam aksi 212.

Selepas Pilkada, muncul semacam arus balik yang luar biasa dari kalangan Muslim moderat dan progresif dalam merespon aksi 212. Sekalipun tidak terkonsolidasikan ke dalam satu aksi, sebagaimana konsolidasi yang dilakukan para proponent aksi 212, mereka melakukan *counter-narrative* terhadap aksi 212. Deklarasi Islam moderat bermunculan dari organ-organ Islam moderat, mulai dari pesantren, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, organisasi pergerakan seperti PMII, forum rektor, dekan dan asosiasi dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) dan lainnya. Berbagai *slogan* seperti *Saya Indonesia, Saya Pancasila, NKRI Harga Mati*, dan sejenisnya bertebaran di berbagai media. Arus balik yang cukup ekstrim terlihat dari kebijakan kementerian pendidikan dan juga lembaga pendidikan tinggi yang ada di bawahnya yang menerbitkan peraturan pelarangan pemakaian cadar dan bahkan melakukan pemecatan terhadap pendidik yang terdeteksi menjadi bagian dari ormas Islam radikal.

Apakah semua respon yang dilakukan negara dan elemen Muslim moderat itu mampu mengembalikan citra Islam Indonesia yang ramah, toleran dan demokratis? Tindakan yang dilakukan kedua elemen masyarakat, politik dan sipil, untuk beberapa saat, memang dapat meredam dan mengerem laju perkembangan aktivisme Islam intoleran. Hanya saja, terobosan keduanya tidak serta merta mampu mengembalikan

wajah damai dan toleran Islam Indonesia. survei terkini yang menanyakan pendapat warga Australia tentang Indonesia, maka kata-kata yang paling populer yang merujuknya adalah 'religius' (68 persen). Ketika dilakukan *Focuss Group Discussion* (FGD), kata-kata religious itu mengacu pada 'Islam'. Pada umumnya, partisipan memiliki pandangan negative tentang Islam Indonesia, yang diasosiasikan dengan 'terorisme' dan 'Timur Tengah' (Greg Fealy, 2017).

Penutup

Dalam beberapa decade terakhir ini, citra intoleran begitu kuat melekat pada jati diri Islam Indonesia. Implikasinya, demokrasi Indonesia yang turut didukung oleh nilai-nilai moderasi Islam pun, juga mengalami kemerosotan. Peristiwa aksi 212 yang berlangsung selama Pilkada DKI Jakarta, pada kenyataannya dapat mengurangi klaim Indonesia sebagai negara Muslim democrat yang moderat.

Referensi

- Bruinessen, Martin van. 2013. *Contemporary Development in Indonesian Islam, Explaining the Conservative Turn*, Singapore: ISEAS.
- Fealy, Greg. 2016. "Bukan Sekedar Ahok: Menjelaskan Aksi Massa pada 2 Desember", dalam *Indonesia at Melbourne*, 12 Desember.
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, Princeton University Press.
- Menchik, Jeremy. 2014. "Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia", *Comparative Studies in Society and History*.
- Mietzner, Marcus. Indonesia's democratic stagnation: anti-reformis elites and resilient civil society. *Democratization*, 19:2.

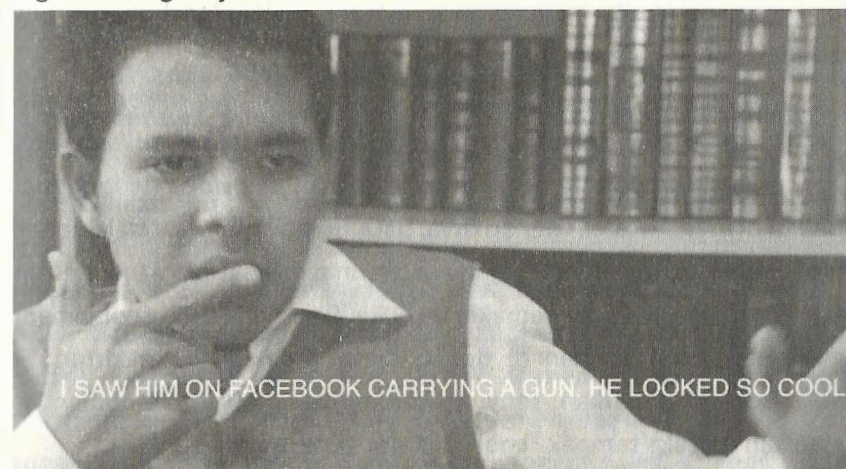
- Woodward, Mark. R. 2001. "Indonesia, Islam, and the Prospect for Democracy", *SAIS Review*. The Johns Hopkins University Press.
- Haluan. 2016. *Indeks Demokrasi Indonesia dan Tantangannya*.
- UCAN Indonesia. 2012. *Survei: Indeks Demokrasi Indonesia Menurun*.

Propaganda Teroris, Media Sosial dan Generasi Millennial Indonesia

Elis Z. Anis

"Saya lihat-lah foto-foto beliau, gagah sekali dia pegang tembak," kata Akbar (17 tahun), dalam penggalan film dokumenter *Jihad Selfie*, yang diproduksi Yayasan Prasasti Perdamaian. Akbar tidak mampu menutupi rasa kagumnya terhadap foto *selfie* kakak kelasnya yang tengah menenteng senjata AK-47 sebagai pasukan ISIS. Gagah dan heroik.

Foto tersebut mendapatkan banyak "likes" dari para *ukhti* (perempuan Muslim) di media sosial. Pada kesempatan lain Akbar juga menceritakan kepada penulis betapa video berjudul "*Land of Men*" yang dikirimkan kakak kelasnya melalui facebook itu telah menantang keberanian dan nalurinya sebagai "lelaki" untuk pergi ke Syria, yang dinarasikan oleh para "jihadis" (teroris) sebagai wilayah atau tanah para lelaki. Di Syria, Akbar dijanjikan senjata AK-47, kuda yang gagah, dan 72 bidadari di surga sebagai hadiah dari Allah jika ia tewas di medan laga sebagai seorang mujahid.



I SAW HIM ON FACEBOOK CARRYING A GUN. HE LOOKED SO COOL

Akbar dalam film dokumenter *Jihad Selfie* (Youtube)